



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Perbandingan Kebijakan Industri Pemerintah Korea
Selatan Dalam Menanggulangi Krisis Ekonomi Pada 1997
dan 2008**

Skripsi

Oleh

Silviana Kurniawan

2015330078

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Perbandingan Kebijakan Industri Pemerintah Korea
Selatan Dalam Menanggulangi Krisis Ekonomi Pada 1997
dan 2008**

Skripsi

Oleh

Silviana Kurniawan

2015330078

Pembimbing

Stanislaus Risadi Apresian, S.IP., MA

Bandung

2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Silviana Kurniawan
NPM : 2015330078
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Perbandingan Kebijakan Industri Pemerintah
Korea Selatan Dalam Menanggulangi Krisis
Ekonomi Pada 1997 dan 2008.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 18 Januari 2019

Silviana Kurniawan
2015330078

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Perbandingan Kebijakan Industri Pemerintah Korea Selatan Dalam Menanggulangi Krisis Ekonomi Pada 1997 dan 2008.” Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gelar akademik Strata-1 (S1) Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Penelitian ini membahas mengenai perbandingan kebijakan industri yang diambil oleh Pemerintah Korea Selatan dalam mengatasi kedua krisis yang terjadi di Korea Selatan yaitu pada tahun 1997 dan 2008. Penelitian ini menggunakan empat teori untuk menganalisa kebijakan industri tersebut.

Keterbatasan penulis membuat penelitian ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah dibutuhkan. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut mengambil bagian dalam proses pembuatan penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkatNya, saya dapat menyelesaikan skripsi dan kuliah ini dalam waktu 3,5 tahun ini. Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada mama dan papa yang telah sabar menghadapi anakmu yang sangat temperamen ini. Ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada cece saya yang telah memberikan semangat saat pengerjaan skripsi dengan mengirim foto-foto Kimoy yang sangat lucu.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya, Mas Apres yang sangat membimbing dan membantu dalam skripsi ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Edo yang sering membelikan makanan kalau aku laper hahahaha. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada bang EJ Gaming karena konten konten Youtube nya sangat menghibur dan menghilangkan kebosanan saat mengerjakan skripsi. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Garena yang telah membuat game AOV yang sangat seru sehingga saya bisa menjadi pro #Lauriel 28 di Bandung. I love you so much AOV.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada anak saya @sweet_berryshop yang sangat membantu kehidupan finansial saya selama kuliah sehingga saya tidak lagi meminta uang kepada orang tua. Semoga kamu tetap menjadi finansial utama mama selamanya ya. I love you so much @sweet_berryshop. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Sweet Berry Shop, yaitu admin Christin Hani dan Amrita Adina yang telah banyak

membantu packing dan orderan sehingga owner bisa mengerjakan skripsi dengan tenang dan bisa bermain AOV dengan baik hahahaha.

Terakhir, saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Evos Inti yaitu Evos Wanda selaku kapten dari Evos dengan role the best support in Indonesia dan juga kepada Evos Tasya selaku abyssal laner role archer yang sangat hebat. Terima kasih karena sering menjadi beban tim hahahahahaha. Tapi tenang, aku gendong kalian semua. Kita pasti bisa mencapai rank conqueror gengsssss!!!!!! Terima kasih juga telah menjadi teman selama kuliah, bahkan soon menjadi business partner Gultik 88, yeayyyy!! Terima kasih karena telah menerima saya yang freak ini yang sering menjadi dori. Terima kasih juga telah memberikan arti apa itu pertemanan. We're not just friend, but family yuhuuu jijayyyyy.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Pertanyaan Penelitian.....	10
1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.5.1 Tujuan Penelitian	11
1.5.2 Kegunaan Penelitian	11
1.6 Kajian Literatur	11
1.7 Kerangka Pemikiran	15

1.8 Metode dan Teknik Pengumpulan Data.....	22
1.8.1 Metode Penelitian	22
1.8.2 Teknik Pengumpulan Data	22
1.9 Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II: KRISIS FINANSIAL ASIA 1997 DAN KRISIS GLOBAL 2008	25
2.1. Krisis Finansial Asia 1997	25
2.1.1 Penyebab Krisis 1997.....	25
2.1.2. Dampak Terhadap Ekonomi Asia	27
2.2. Krisis Ekonomi Global 2008.....	32
2.2.1. Penyebab Krisis 2008.....	32
2.2.2. Dampak Terhadap Ekonomi Dunia.....	34
BAB III: KONDISI INDUSTRI KOREA SELATAN SAAT KRISIS 1997 DAN 2008	40
3.1. Kondisi Industri Korea Selatan Saat Krisis 1997	40
3.1.1. Kondisi Perusahaan <i>Chaebol</i>	40
3.1.2. Indeks Harga Produsen (IHP).....	48
3.1.3. Kondisi Tenaga Kerja.....	50
3.2. Kondisi Industri Korea Selatan Saat Krisis 2008	54
3.2.1. Kondisi Perusahaan <i>Chaebol</i>	54
3.2.2. Indeks Harga Produsen (IHP).....	60
3.2.3. Kondisi Tenaga Kerja.....	61
3.3. Perbandingan Kondisi Ekonomi Korea Selatan Saat Krisis 1997 dan 2008	66

BAB IV: ANALISA PERBANDINGAN KEBIJAKAN INDUSTRI	
PENANGGULANGAN KRISIS 1997 DAN 2008	70
4.1. Kebijakan Penanggulangan Krisis 1997	70
4.1.1. Kebijakan Industri.....	70
4.1.2. Kebijakan Tenaga Kerja.....	77
4.2. Kebijakan Penanggulangan Krisis 2008	80
4.2.1. Kebijakan Industri.....	80
4.2.2. Kebijakan Tenaga Kerja.....	84
4.3. Analisa Perbandingan Kebijakan Industri Penanggulangan Krisis 1997 dan 2008	87
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
5.1. Kesimpulan.....	95
5.2. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Tujuh Tahapan Krisis Minsky.....	17
Gambar 2.1: Krisis Finansial Asia 1997	25
Gambar 2.2: Krisis Ekonomi Global 2008.....	32
Gambar 4.1: Proses Tahapan Jasa <i>Job Center</i>	85

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1: Tingkat Inflasi Tahun 1997-1998	28
Grafik 2.2: Tingkat Pengangguran Tahun 1997-1998	29
Grafik 2.3: <i>Food Price Index</i>	30
Grafik 2.4: Perdagangan Barang dan Jasa Dunia 2007-2010.....	35
Grafik 2.5: Ekspor Dagang Uni Eropa Tahun 2007-2010 (dalam USD).....	36
Grafik 2.6: GDP Uni Eropa Tahun 2006-2011 (dalam USD).....	37
Grafik 2.7: Tingkat Pengangguran Uni Eropa Tahun 2006-2011 (dalam Persentase).....	38
Grafik 2.8: Ekspor Dagang Asia Pasifik Tahun 2006-2011 (dalam USD).....	39
Grafik 3.1: <i>South Korea New Orders</i> (dalam Juta Won).....	45
Grafik 3.2: Total Produksi Manufaktur Korea Selatan (dalam Persentase).....	46
Grafik 3.3: Tingkat Kebangkrutan Perusahaan Korea Selatan.....	47
Grafik 3.4: Indeks Harga Produsen Korea Selatan (dalam Indeks Poin).....	48
Grafik 3.5: Tingkat Inflasi Korea Selatan (dalam Persentase).....	49
Grafik 3.6: Tingkat Pengangguran di Korea Selatan Tahun 1991-2000.....	50
Grafik 3.7: Kondisi Tenaga Kerja Korea Selatan 1997 Berdasarkan Umur	52
Grafik 3.8: Kondisi Tenaga Kerja Korea Selatan 1997 Berdasarkan Status.....	52
Grafik 3.9: Biaya Unit Tenaga Kerja dalam Industri Korea Selatan	53
Grafik 3.10: Ekspor Dagang Korea Selatan Tahun 2006-2011 (dalam USD).....	55
Grafik 3.11: <i>South Korea New Orders</i> Tahun 2007-2010 (dalam Juta Won).....	56
Grafik 3.12: Total Produksi Manufaktur Korea Selatan (dalam Persentase).....	58

Grafik 3.13: Tingkat Kebangkrutan Perusahaan Korea Selatan.....	59
Grafik 3.14: Indeks Harga Produsen Korea Selatan 2008-2010	60
Grafik 3.15: Tingkat Pengangguran Korea Selatan 2006-2010 (dalam Persentase)	62
Grafik 3.16: Kondisi Tenaga Kerja Korea Selatan 2008 Berdasarkan Umur (dalam Persentase).....	63
Grafik 3.17: Kondisi Tenaga Kerja Korea Selatan 2007 Berdasarkan Status.....	64
Grafik 3.18: Persentase Perubahan Tingkat Upah Tenaga Kerja Korea Selatan ..	65

DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
DW	: <i>Daily Workers</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
ICSIC	: <i>International Standard Industrial Classification</i>
IHP	: Indeks Harga Produsen
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
KTC	: <i>Korean Tripartite Commision</i>
M&A	: <i>Merger and Acquisition</i>
NS	: <i>Non-Salaried Workers</i>
OECD	: <i>Organisation of Economic Cooperation and Development</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PE	: <i>Permanent Workers</i>
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
SME	: <i>Small and Medium-sized Enterprises</i>
TE	: <i>Temporary Workers</i>
USD	: <i>United States Dollar</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Tingkat Kemiskinan Tahun 1997-1998.....	30
Tabel 3.1: Kondisi Industri Korea Selatan 1996-2000	42
Tabel 4.1: Perjanjian Restrukturisasi Bisnis Korea Selatan	73
Tabel 4.2: Empat Perbedaan Kebijakan Industri Penanggulangan Krisis 1997 dan 2008	87

ABSTRAK

Nama : Silviana Kurniawan

NPM : 2015330078

Judul : Perbandingan Kebijakan Industri Pemerintah Korea Selatan Dalam Menanggulangi Krisis Ekonomi Pada 1997 dan 2008

Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia. Bahkan, Korea Selatan disebut sebagai salah satu Macan Asia. Namun, hal itu tidak membuat Korea Selatan terlepas dari masalah krisis ekonomi. Dalam sejarahnya, Korea Selatan mengalami dua kali krisis ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap perekonomiannya, yaitu pada tahun 1997 dan 2008. Dalam menghadapi kedua krisis tersebut, Korea Selatan dianggap sebagai salah satu negara dengan tingkat pemulihan ekonomi yang cepat. Korea Selatan membutuhkan waktu tiga tahun untuk pulih dari krisis 1997. Lain halnya pada krisis 2008, Korea Selatan hanya membutuhkan waktu satu tahun saja. Perbedaan waktu pemulihan krisis ini tidak terlepas dari kebijakan industri yang mereka gunakan saat terjadinya krisis. Seperti yang diketahui, sektor industri Korea Selatan didominasi oleh para *chaebol* dan dianggap sebagai mesin utama penggerak ekonomi Korea Selatan. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian dalam skripsi ini yaitu **“Bagaimana perbandingan kebijakan industri Pemerintah Korea Selatan dalam menanggulangi krisis ekonomi pada 1997 dan 2008?”** Dengan menggabungkan beberapa teori dan konsep, seperti teori krisis finansial Minsky, teori ekonomi politik Keynesian, dan konsep *developmentalism*, penelitian ini membandingkan dan menganalisa kebijakan industri Korea Selatan saat krisis terjadi. Dari hasil analisa, disimpulkan bahwa ada lima perbedaan kebijakan industri yang diambil saat terjadinya krisis 1997 dan 2008. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan membandingkan kebijakan industri di belakang kesuksesan Korea Selatan dalam menanggulangi krisis ekonomi 1997 dan 2008.

Kata Kunci: *Krisis Finansial Asia 1997, Krisis Global 2008, Chaebol, Kebijakan Industri Korea Selatan, Developmentalism*

ABSTRACT

Name : Silvana Kurniawan

NPM : 2015330078

Title : The Comparison of South Korean Government's Industrial Policy in
Tackling the Economic Crises in 1997 and 2008

South Korea is renowned as one of Asia's countries with the highest economic growth. Due to this, South Korea is called one of the Asian Tigers. However, this does not mean that the country is immune to economic crises. In fact, South Korea had experienced two economic crises in 1997 and 2008 with enormous effects on its economy. In dealing with these economical crises, South Korea is considered as one of the countries with a quick economic recovery rate. South Korea needed three years to recover from 1997's Financial Crisis and only a year to recover from 2008's Global Crisis. Their industrial policy played no small part in the time difference of solving the crises. The industrial sector, which is dominated by the chaebol, is the primary engine of their economic growth. Thus, the research question for this paper is "**How does the South Korean government's industrial policy in tackling the economic crises in 1997 and 2008 compare?**" By combining several theories and concepts, such as Minsky's financial crisis theory, Keynesian political economy theory, and the concept of developmentalism, this study compares and analyzes South Korea's industrial policies during the crisis. From the results of the analysis, it was concluded that there were five differences in industrial policies taken during the 1997 and 2008 crises. Therefore, this study aims to explain and compare the industrial policies behind South Korea's success in facing the economic crises of 1997 and 2008.

Keywords: *Financial Crisis 1997, Global Crisis 2008, Chaebol, South Korea's Industrial Policies, Developmentalism*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan sebuah negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dibutuhkan, sebab dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka negara dapat melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional sendiri bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas, dan pendapatan. Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, maka suatu negara tidak dapat berkembang. Bahkan, Rothbard dalam bukunya yang berjudul *Man, Economy, and State with Power and Market* mengatakan bahwa ekonomi berhubungan dengan naik turunnya peradaban suatu negara dan mempengaruhi hubungan antar negara apakah akan bekerja sama atau konflik.¹

Dalam masa globalisasi sekarang, tidak dapat dipungkiri bahwa negara berusaha untuk melakukan kerja sama hampir di semua bidang untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara mereka. Horst Köhler berpendapat bahwa kerja sama ekonomi internasional bukan hanya bermanfaat untuk ekonomi nasional, namun juga menjadi faktor yang

¹ Murray N Rothbard, *Man, Economy, and State with Power and Market 2nd Edition* (Alabama: Ludwig von Mises Institute, 2009), 976.

sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi global.² Liberalisasi dan perdagangan internasional menjadi kunci untuk memperkuat sistem ekonomi internasional. Dengan demikian, adanya globalisasi menciptakan liberalisasi dan perdagangan internasional. Hal ini memunculkan sifat ketergantungan antar negara. Saling ketergantungan antar negara yang hampir di semua sektor ini kemudian menjadi faktor yang meningkatkan kerja sama internasional untuk memastikan bahwa integrasi ekonomi dapat bermanfaat untuk semua negara.³

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalankan aktivitas ekonomi, negara mempunyai ancaman dalam mengalami krisis ekonomi. Terlebih lagi dalam masa globalisasi sekarang, semua negara saling bergantung satu sama lain sehingga hampir di semua bidang, negara saling bekerja sama satu sama lainnya. Dengan demikian, krisis ekonomi di suatu negara dapat menular ke negara lain, atau disebut juga sebagai efek domino. Krisis ekonomi sendiri merupakan situasi dimana nilai institusi finansial suatu negara mengalami penurunan yang diikuti dengan inflasi, penarikan investasi asing, bangkrutnya bank dan perusahaan nasional yang menyebabkan pengangguran meningkat tajam, dan penurunan mata uang.⁴

Dalam sejarah internasional, ada dua kali sejarah krisis ekonomi besar yang berdampak pada negara-negara di dunia. Pertama adalah krisis ekonomi tahun 1997. Krisis ini disebut juga sebagai Krisis Finansial Asia. Krisis ini

² Horst Köhler, "Strengthening Growth Through Regional and Global Economic Cooperation," *International Monetary Fund*, 4 September 2003, <http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp090403> (diakses pada 1 Februari 2018).

³ *Ibid.*

⁴ Rothbard, *Man, Economy, and State with Power and Market 2nd Edition*, 852.

bermula dari ekonomi Thailand yang terguncang.⁵ Iklim investasi Thailand tidak stabil sehingga pemerintah Thailand mengambil langkah untuk melakukan kebijakan nilai tukar mengambang (*floating exchange rate*), terhadap Baht. Namun hal ini malah mengakibatkan Baht terdepresiasi.⁶ Krisis Thailand ini langsung menyebar cepat ke kawasan Asia seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, bahkan Korea Selatan dan Jepang.⁷

Thailand bahkan mengalami penurunan GDP sebesar -21,2%.⁸ Indonesia merupakan yang paling parah karena mengalami penurunan sebesar -43,2%, disusul oleh Malaysia (-19%), Korea Selatan (-18,5%), dan Filipina (-12,5%).⁹ Bukan hanya itu saja, mata uang negara Asia mengalami depresiasi, seperti Baht mengalami depresiasi sebesar -40,20%.¹⁰ Pada tahun tersebut, Thailand merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Asia Tenggara, yaitu hanya sebesar -2,8%.¹¹ Di sisi lain, dari tingkat inflasi, Laos merupakan negara yang paling tinggi mengalami inflasi yaitu sebesar 90,14%. Adanya krisis ekonomi menyebabkan tingkat pengangguran meningkat sebesar dua kali lipat di Indonesia dan Korea Selatan.

Krisis ekonomi besar juga terjadi pada tahun 2008. Kali ini, krisis ekonomi berasal dari Amerika Serikat. Krisis ini disebut juga sebagai Krisis Ekonomi Global/ *Subprime Mortgage Crisis*. Krisis ini berawal dari keinginan orang-orang

⁵ Justin Kuepper, "What was The Asian Financial Crisis," *The Balance*, 20 Maret 2017, <https://www.thebalance.com/what-was-the-asian-financial-crisis-1978997> (diakses pada 1 Februari 2018).

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Amerika Serikat untuk memiliki rumah atau disebut juga sebagai “*American dream*”.¹² Namun tidak semua orang dapat memiliki rumah karena harga yang mahal. Untuk itu, pada tahun 2000, pemerintah AS menerapkan konsep kredit dengan bunga yang rendah agar masyarakat bisa mendapatkan pinjaman yang besar dengan cicilan yang kecil tiap bulannya. Hal ini dilakukan pemerintah AS untuk menghidupkan unit-unit bisnis di AS terutama unit perumahan. Terbukti, harga rumah naik secara drastis dan kreditor meyakini bahwa memberikan kredit terhadap unit perumahan merupakan sesuatu yang menguntungkan sehingga kreditor mau untuk meminjamkan pinjaman kepada masyarakat.

Namun, sayangnya dengan sistem kredit tersebut, malah membuat masyarakat AS menganggap semua barang menjadi murah sehingga timbul-lah sifat hedonisme dan konsumerisme. Masyarakat AS hidup dalam konsumerisme di luar batas kemampuan pendapatan yang diterimanya. Mereka hidup dalam keadaan terlilit hutang kredit barang dan rumah. Akibatnya, masyarakat tidak mampu membayar kredit yang berujung pada kredit macet. Hal ini berujung pada bangkrutnya bank atau lembaga keuangan dan perusahaan besar seperti Lehman Brothers, Goldman Sachs dan Wall Street. Krisis AS ini menyebabkan pemerintah AS mengalami defisit sebesar 648 juta USD karena pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibanding sebelumnya, atau setara dengan kehilangan 5.800 USD dalam rata-rata setiap pendapatan masyarakat AS.¹³ Di sisi lain, krisis ini juga

¹² Justin Pritchard, “The Mortgage Crisis Explained,” *The Balance*, 31 Juli 2017, <https://www.thebalance.com/mortgage-crisis-overview-315684> (diakses pada 1 Februari 2018).

¹³ “The Impact of the September 2008 Economic Collapse,” *The Pew Charitable Trusts*, 28 April 2010, <http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/reports/2010/04/28/the-impact-of-the-september-2008-economic-collapse> (diakses pada 1 Februari 2018).

menyebabkan pertumbuhan global GDP menurun sebesar 2%. Bahkan pada tahun 2009, volume perdagangan dunia menurun sebesar -10%.¹⁴

Dengan adanya krisis ekonomi yang menyebar, perlu adanya tindakan pemerintah untuk membendung dampak negatif dari krisis ekonomi tersebut. Selain kebijakan moneter, salah satu tindakan pemerintah yang dilakukan untuk meminimalisir dampak krisis adalah dengan mengeluarkan kebijakan industri untuk melindungi industri dalam negeri. Sebagaimana diketahui, apabila industri dalam negeri tidak berjalan, maka perekonomian negara juga tidak berjalan, sebab industri merupakan salah satu komponen penggerak roda ekonomi negara (*life cycle of economy*). Hal ini juga yang dilakukan pemerintah Korea Selatan dalam menanggulangi krisis ekonomi pada tahun 1997 dan 2008 yaitu mengeluarkan berbagai kebijakan industri untuk menjaga kondisi industri domestiknya agar tetap berjalan sehingga perekonomian negara juga tetap berjalan.

Hal ini menunjukkan bahwa krisis ekonomi terjadi seperti fase siklus lingkaran yang akan terus berulang. Hal ini selaras dengan teori siklus bisnis yang menjelaskan tentang fase naik dan turunnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi seiring waktu.¹⁵ Oleh sebab itu, studi tentang krisis ini sangat penting untuk dilakukan untuk melihat dan memahami trend ekonomi yang sedang terjadi.

¹⁴ “The Global Financial Crisis and Its Impact on Developing Countries,” *World Bank Monitoring Report*, 2009, http://siteresources.worldbank.org/INTGLOMONREP2009/Resources/59243491239742507025/GMR09_ch01.pdf (diakses pada 3 Februari 2018).

¹⁵ Kimberly Amadeo, “What is The Business Cycle,” *The Balance*, 2 Agustus 2018, <https://www.thebalance.com/what-is-the-business-cycle-3305912> (diakses pada 18 Agustus 2018).

1.2. Identifikasi Masalah

Sejak tahun 1950, industri Korea Selatan berkembang pesat. Pada tahun 1970, Korea Selatan sudah berhasil dalam industri baja, kapal, dan petrokimia. Tak berhenti sampai disitu, Korea Selatan menaruh prestasi pada tahun 1990 karena telah berkembang ke industri teknologi dan informasi. Puncaknya pada tahun 2000-an, Korea Selatan sudah memasuki masa industri teknologi tinggi.¹⁶ Hal inilah yang membuat Korea Selatan masuk menjadi Macan Asia, bersanding dengan Hongkong, Singapura, dan Taiwan. Pada tahun 1980 saja, Korea Selatan telah berhasil memperoleh pendapatan per kapita sebesar 2.300 USD.¹⁷

Meskipun Korea Selatan menjadi Macan Asia, Korea Selatan juga tidak dapat menghindari terjadinya krisis ekonomi. Dalam sejarahnya, Korea Selatan mengalami dua kali krisis ekonomi yang berdampak signifikan terhadap perekonomian mereka, yaitu pada tahun 1997 dan 2008. Krisis keuangan Asia 1997 dan krisis ekonomi global 2008 berasal dari dua sumber yang berbeda dan juga lingkup dan cara yang berbeda dalam menyebarkan krisis terhadap ekonomi Korea Selatan.¹⁸ Pada krisis 1997 bersifat regional yang hanya melanda kawasan Asia Timur seperti Korea Selatan, Indonesia, Malaysia, Thailand dan tidak berdampak pada kawasan lainnya seperti Eropa maupun Amerika. Lain halnya

¹⁶ "See How Korea's Tiger Economy Grew with New Korean Industry Tour Guide," *Korea Tourism Organization*, 19 September 2011, http://english.visitkorea.or.kr/enu/KOO/OO_EN_13_4_2.jsp?gotoPage=41&cid=1387174 (diakses pada 3 Februari 2018).

¹⁷ Gary Dorsch, "South Korea Emerges as Top Asian Tiger," *Financial Sense*, 24 November 2010, <https://www.financialsense.com/contributors/gary-dorsch/south-korea-emerges-as-top-asian-tiger> (diakses pada 3 Februari 2018).

¹⁸ "Republic of Korea Development of National Employment Policies through Two Economic Crises Lessons from Its Experiences," *International Labour Organization*, 2012, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/---cepol/documents/publication/wcms_201104.pdf (diakses pada 3 Februari 2018).

dengan krisis 2008, yang dampaknya menyebar secara global baik kepada kawasan Amerika, Eropa, maupun Asia.

Dalam menjalankan perekonomiannya, Korea Selatan mengedepankan strategi industrialisasi orientasi ekspor. Selama empat dekade sebelum krisis 1997, pemerintah Korea Selatan mengalokasikan modal negara terhadap perusahaan konglomerat, yang disebut juga sebagai *chaebol*.¹⁹ Menurut definisinya, kata *chaebol* berasal dari kata “*chae*” yang artinya kaya dan “*bol*” yang artinya klan sehingga *chaebol* merupakan beberapa kelompok perusahaan yang saling berhubungan yang biasanya dikelola oleh keluarga kaya.²⁰ Umumnya, *chaebol* adalah bisnis milik keluarga yang memiliki berbagai anak perusahaan di berbagai industri dimana kegiatannya tersebut mendominasi ekonomi Korea Selatan.²¹ *Chaebol* sendiri mulai muncul sejak akhir Perang Korea. Pada saat itu, pemerintah Korea Selatan memberikan dana bantuan dan pinjaman murah kepada pengusaha yang berjanji untuk membangun Korea Selatan kembali.²² Pada masa ini, pemerintah Korea Selatan juga menerapkan proteksionisme untuk melindungi industri lokal terhadap persaingan dunia luar. Hasilnya, *chaebol* memegang peranan penting dalam sejarah Korea Selatan menjadi negara industri maju.²³

¹⁹ Jahyeong Koo dan Sherry L Kiser, “Recovery from a Financial Crisis: The Case of South Korea,” *Federal Reserve Bank of Dallas*, <https://www.dallasfed.org/~media/documents/research/efr/2001/efr0104c.pdf> (diakses pada 3 Februari 2018).

²⁰ Carlos Tejada, “Money, Power, Family,” *The New York Times*, 17 Februari 2017, <https://www.nytimes.com/2017/02/17/business/south-korea-chaebol-samsung.html> (diakses pada 18 September 2018).

²¹ Eleanor Albert, “South Korea Chaebol’s Challenge,” *Council on Foreign Relations*, 4 Mei 2018, <https://www.cfr.org/backgrounder/south-koreas-chaebol-challenge> (diakses pada 18 September 2018).

²² Tejada, “Money, Power, Family,”.

²³ *Ibid.*

Bahkan, 10 *chaebol* terbesar dan terkaya di Korea Selatan memegang 27% aset bisnis di Korea Selatan.²⁴

Pada tahun 1990-an, grup *chaebol* terbesar di Korea Selatan adalah Hyundai, diikuti oleh Daewoo, Samsung, dan LG.²⁵ Pada masa ini, peran *chaebol* di Korea Selatan sangatlah besar, bahkan beberapa bank di Korea Selatan dimiliki oleh *chaebol*. Namun, bank yang dikelola oleh *chaebol* memiliki regulasi yang sangat kurang memadai dibandingkan bank komersial lainnya. Akibat ekspansi yang terlalu luas dari *chaebol* dan pengawasan keuangan yang lemah, rasio utang dari tiga puluh *chaebol* terbesar di Korea Selatan mencapai 396,3%.²⁶ Rasio utang ini sangat tinggi dibandingkan rasio utang perusahaan di Amerika Serikat (153,6%), Jepang (193,3%), dan Taiwan (85,7%).²⁷ Kondisi ekonomi internal yang buruk ini semakin diperparah dengan adanya efek domino dari Krisis Thailand 1997.

Pada Juli 1997, 7 dari 30 *chaebol* di Korea Selatan mengalami gulung tikar. Hal ini diperparah pada tahun 1998, GDP Korea Selatan mengalami penurunan sebesar -18,5% (sebesar 223,8 miliar USD) dengan tingkat depresiasi Won sebesar -68.25%.²⁸ Angka kemiskinan di Korea Selatan pun meningkat

²⁴ Peter Pae, "South Korea's Chaebol," *Bloomberg*, 29 May 2014, <https://www.bloomberg.com/quicktake/republic-samsung> (diakses pada 3 Februari 2018).

²⁵ Stephan Haggard, *Economic Crisis and Corporate Restructuring in Korea: Reforming the Chaebol* (New York: Cambridge University Press, 2003), 41.

²⁶ Koo dan Kiser, "Recovery from a Financial Crisis: The Case of South Korea."

²⁷ Soon Yang Kim, "South Korea's Policy Responses to Global Economic Crisis," *Global Biz Research* (2014): 4, http://globalbizresearch.org/Dubai_Conference/pdf/pdf/D426.pdf (diakses pada 10 Februari 2018).

²⁸ Wen Shwo Fang dan Stephen M Miller, "Currency Depreciation and Korean Stock Market Performance during the Asian Financial Crisis," *Economic Working Papers*, 2002, http://opencommons.uconn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1285&context=econ_wpapers (diakses pada 10 Februari 2018).

drastis sebesar lebih dari dua kali lipat (dari 9,6% menjadi 19,2%).²⁹ Meskipun krisis ini menggoncang perekonomian Korea Selatan, pemerintah Korea Selatan berhasil melakukan pemulihan ekonomi selama 3 tahun yaitu sampai tahun 2001 dimana Korea Selatan telah berhasil membayar pinjaman uang kepada IMF.³⁰

Lain halnya dengan krisis ekonomi 2008, depresiasi Won lebih rendah dibanding pada tahun 1997, yaitu sebesar -42,5%.³¹ Sebagai akibat dari turunnya volume perdagangan internasional, volume ekspor Korea Selatan juga menurun sebesar -19,5%. Hal ini disebabkan karena ketergantungan Korea Selatan yang sangat besar terhadap ekspor, terutama pada Amerika Serikat. Hal ini juga menyebabkan volume perdagangan Korea Selatan mengalami defisit sebesar 13 miliar USD.³² Bahkan, perusahaan *chaebol* seperti Hyundai melakukan pemangkas produksi sebesar 20.000 kendaraan dalam negeri dan menghentikan produksi kendaraan di Amerika Serikat, India, RRT, dan Turki.

Pada saat krisis ini, GDP Korea Selatan mengalami penurunan sebesar 221 miliar USD.³³ Meskipun demikian, Korea Selatan mengalami pemulihan yang sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada krisis 1997. Korea Selatan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dalam waktu 1 tahun,

²⁹ M Ramesh, "Economic Crisis and its Social Impacts: Lessons from the 1997 Asian Economic Crisis," *Sagepub* Vol 9 (2009):82, <http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1468018109106886> (diakses pada 10 Februari 2018).

³⁰ Lucy Williamson, "What Eurozone Countries Can Learn from South Korea," *BBC News*, 9 Juli 2012, <http://www.bbc.com/news/business-18719079> (diakses pada 10 Februari 2018).

³¹ Hangyong Lee dan Changyong Rhee, "Lessons from the 1997 and the 2008 Crises in the Republic of Korea," *ADB Economics Working Paper Series* No. 298 (2012):3, <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29659/economics-wp-298.pdf> (diakses pada 10 Februari 2018).

³² John Chan, "South Korean Economy Heading Toward Negative Growth in 2009," *International Committee of the Fourth International*, 2008, <https://www.wsws.org/en/articles/2008/12/kore-d12.html> (diakses pada 10 Februari 2018).

³³"GDP Korea," *The World Bank*, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=KR> (diakses pada 11 Februari 2018).

yaitu pada tahun 2009. Bahkan, pada 2010, Korea Selatan telah seutuhnya pulih dari krisis ekonomi. Hal ini terbukti dari GDP pada tahun 2010 berhasil melampaui GDP pada tahun 2006 sebelum krisis terjadi. Tingkat pemulihan ekonomi yang cepat ini tidak terlepas dari kebijakan industri yang mereka gunakan. Perbedaan tingkat pemulihan saat krisis 1997 dan 2008 menimbulkan pertanyaan sehingga skripsi ini membahas faktor kebijakan industri apa yang menyebabkan perbedaan tingkat pemulihan ekonomi saat kedua krisis terjadi.

1.3. Pembatasan Masalah:

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan masalah pada kebijakan pemerintah Korea Selatan dalam menanggulangi krisis ekonomi 1997 dan 2008. Agar lebih terperinci, penulis akan mengerucutkan pada saat pemerintahan Presiden Kim Dae Jung yang menanggulangi krisis 1997 dan Presiden Lee Myung Bak yang menanggulangi krisis 2008. Selain itu, kebijakan pemerintah yang akan dibandingkan oleh penulis adalah kebijakan bidang industri. Kebijakan industri dipilih untuk diteliti sebab sektor industri sendiri merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian Korea Selatan dimana sektor industri menyumbangkan 65% dari GDP Korea Selatan.

1.4. Pertanyaan Penelitian:

Penelitian ini berdasar pada kebijakan industri yang dilakukan oleh Presiden Kim Dae Jung dan Presiden Lee Myung Bak dalam meminimalisir dampak krisis 1997 dan 2008. Dengan melihat kenyataan bahwa Korea Selatan

lebih cepat pulih pada krisis 2008 dibandingkan pada krisis 1997, sehingga memunculkan hipotesa bahwa kebijakan industri saat krisis 2008 lebih efektif dibandingkan pada saat krisis 1997. Oleh sebab itu, pertanyaan penelitian dalam skripsi ini yaitu, **“Bagaimana perbandingan kebijakan industri Pemerintah Korea Selatan dalam menanggulangi krisis ekonomi pada 1997 dan 2008?”**

1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan bidang industri Korea Selatan dalam menanggulangi krisis ekonomi 1997 dan 2008 sehingga pembaca dapat mengetahui faktor kebijakan apa yang berbeda yang membuat pemerintah Korea Selatan lebih cepat melakukan pemulihan ekonomi pada krisis 2008 dibandingkan pada tahun 1997.

1.5.2. Kegunaan Penelitian:

Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi kepada para pembaca dan kepada pelajar lain tentang kebijakan pemerintah Korea Selatan dalam menanggulangi krisis tahun 1997 dan 2008.

1.6. Kajian Literatur

Dalam topik penulisan penelitian ini, yang membahas tentang perbandingan kebijakan bidang industri Korea Selatan sebagai upaya penanggulangan krisis 1997 dan 2008, penulis akan menggunakan empat literatur

untuk membantu peneliti dalam memperjelas masalah penelitian, membentuk kerangka teoritis, dan juga mengumpulkan informasi.

Dalam literatur pertama, penulis menggunakan jurnal dari Gerardo R Ungson, Richard M. Steers, and Park Seung Ho dalam jurnalnya yang berjudul "*Reappraising Korea: The Crisis, Aftermath, and Future Challenges I*". Jurnal pertama ini menjelaskan bahwa kebijakan pemerintahan Kim Dae Jung pada krisis 1997 adalah dengan bekerja sama dengan IMF. Jurnal ini menjelaskan bahwa kebijakan Kim saat itu lebih kepada strukturisasi perusahaan-perusahaan *chaebol* seperti dengan melakukan peningkatan transparansi audit keuangan. Hal ini disebabkan karena IMF menuntut Kim untuk melakukan perbaikan struktur dalam perusahaan di Korea Selatan. Pada jurnal ini juga dijelaskan bahwa Kim melakukan likuidasi terhadap perusahaan yang bangkrut. Oleh sebab itu, dalam jurnal ini lebih berfokus terhadap cara-cara yang dilakukan Kim dalam melakukan strukturisasi perusahaan di Korea Selatan, yaitu dengan melakukan penggabungan perusahaan, dijual pada investor asing, ataupun dilikuidasi bagi perusahaan kecil dan menengah, sedangkan bagi *chaebol* dilakukan peningkatan audit transparansi keuangan.

Sedangkan literatur kedua berasal dari jurnal Soon Suk Yoon dan Gary Miller yang berjudul "*The Restructuring of the Korean Economy Following the Financial Crisis in 1997*". Bila jurnal pertama lebih berfokus pada kebijakan Kim terhadap perusahaan di Korea Selatan dan langkah-langkah yang diambil dalam melakukan strukturisasi perusahaan, dalam jurnal ini lebih berfokus kepada kebijakan moneter yang dilakukan oleh Kim. Sama seperti jurnal pertama, jurnal

ini juga menyinggung bahwa pada krisis tahun 1997, pemerintahan Kim meminta bantuan pada IMF. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi dalam menanggulangi krisis sangat dipengaruhi oleh IMF. Menurut IMF, kebijakan prioritas dalam menanggulangi krisis pada saat itu adalah dengan mengembalikan nilai tukar mata uang Won di pasar mata uang, oleh karena itu, kebijakan yang diambil adalah dengan cara menaikkan tingkat suku bunga untuk menarik investor asing ke dalam negeri.³⁴ Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa krisis 1997 adalah krisis regional sehingga menarik investor asing adalah cara yang tepat. Di sisi lain, krisis 1997 diperparah dengan tingginya rasio hutang *chaebol*, dengan menaikkan tingkat suku bunga, maka pemerintah mendorong *chaebol* untuk melakukan restrukturisasi dalam badan perusahaan terlebih dahulu, dan tidak menyelesaikan krisis dengan berhutang kembali.

Dalam literatur ketiga karya Heon Joo Jung yang berjudul "*Financial Regulatory Reform in South Korea Then and Now*" pemerintahan Lee Myung Bak pada tahun 2008 melakukan kebijakan yang mendorong perbaikan industri dengan berfokus utama pada restrukturisasi yang dipimpin oleh bank kreditur. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung perusahaan kecil dan menengah agar bisa berinvestasi kembali.³⁵ Di sisi lain, pada kebijakan bidang industri 2008, Lee berfokus pada perusahaan yang sensitif atau peka terhadap ekonomi negara seperti

³⁴ Soon Suk Yoon dan Gary Miller, "The Restructuring of the Korean Economy Following the Financial Crisis in 1997," *International Journal of Management* Vol. 21, no. 2 (06, 2004): 232-239,

<https://search.proquest.com/docview/233232028/A345EC83D47F46F7PQ/2?accountid=31495> (diakses pada 25 September 2018).

³⁵ Heon Joo Jung, "Financial Regulatory Reform in South Korea Then and Now," *Korea Observer* Vol. 40, no. 4 (Winter, 2009): 701-734, https://www.researchgate.net/publication/289015218_Financial_Regulatory_Reform_in_South_Korea_Then_and_Now (diakses pada 22 September 2018).

industri konstruksi dan perkapalan atau ekspedisi.³⁶ Sedangkan pada *chaebol*, pemerintah hanya mendorong agar melakukan perbaikan struktur finansial secara mandiri. Sehingga dapat dilihat pada jurnal ketiga lebih berfokus pada kebijakan Lee dalam strukturisasi perusahaan di Korea Selatan pasca krisis.

Sedangkan dalam literatur keempat karya Choong In Moon yang berjudul “*South Korea in 2009: From Setbacks to Reversal*”, berfokus pada kebijakan moneter dan fiskal yang dilakukan oleh pemerintahan Lee. Krisis 2008 merupakan krisis global sehingga menurut Lee menaikkan tingkat suku bunga untuk menarik investor asing adalah tidak tepat sebab investor akan mengurus masalah internal mereka terlebih dahulu. Oleh karena itu, pada tahun 2008, pemerintah Lee menurunkan tingkat suku bunga dan pajak, dengan tidak ada efek signifikan terhadap arus modal masuk.³⁷ Dengan menurunkan tingkat suku bunga dan pajak, maka pemerintah mendorong perusahaan kecil dan menengah untuk melakukan investasi. Di sisi lain, dengan menurunkan pajak, maka masyarakat akan meningkatkan konsumsi mereka sehingga hal ini meningkatkan konsumsi domestik.³⁸

Sedangkan penelitian ini secara khusus berada di posisi untuk menjelaskan perbandingan perbedaan kebijakan bidang industri yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dalam mengatasi krisis ekonomi pada tahun 1997 dan 2008. Peneliti akan lebih berfokus pada kebijakan strukturisasi perusahaan serta

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Chung In Moon, "South Korea in 2009: From Setbacks to Reversal," *Asian Survey* Vol. 50, no. 1 (Januari 2010): 61, <https://search.proquest.com/docview/224259291/D5EFD03CAEF243C3PQ/1?accountid=31495> (diakses pada 29 September 2018).

³⁸ *Ibid.*

kebijakan tentang tenaga-kerjaan. Namun, peneliti juga akan menjelaskan sedikit latar belakang pengaplikasian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Kim dan Lee yang berhubungan dengan kebijakan moneter dan fiskal seperti yang dijelaskan dalam literatur kedua dan keempat. Dengan demikian, penelitian ini akan melihat perbedaan kebijakan apa yang diambil sehingga berpengaruh pada kondisi pemulihan perekonomian Korea Selatan pasca krisis.

1.7. Kerangka Pemikiran

Setelah perang dingin berakhir, dunia mengalami perubahan orientasi dalam hubungan internasional, yang awalnya merupakan orientasi geopolitik menjadi geoekonomi.³⁹ Hal ini ditandai dengan meningkatnya hubungan kerja sama ekonomi internasional bahkan hampir dalam semua bidang. Ditambah dengan adanya globalisasi, maka terbentuknya hubungan interdependensi atau saling ketergantungan antar negara. Negara berusaha untuk ikut serta dalam kerja sama ekonomi internasional untuk meningkatkan ekonomi negara, tak terkecuali Korea Selatan. Namun, meskipun menguntungkan, hubungan interdependensi dapat mengakibatkan efek domino kepada negara lain apabila terjadi krisis ekonomi di satu negara. Sehingga kerja sama ekonomi internasional di satu sisi dapat menguntungkan negara karena meningkatkan perekonomian negara namun di sisi lain dapat mengguncang ekonomi negara apabila terjadi krisis ekonomi, seperti yang terjadi di Korea Selatan.

³⁹ Bob Sugeng Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), p: 10.

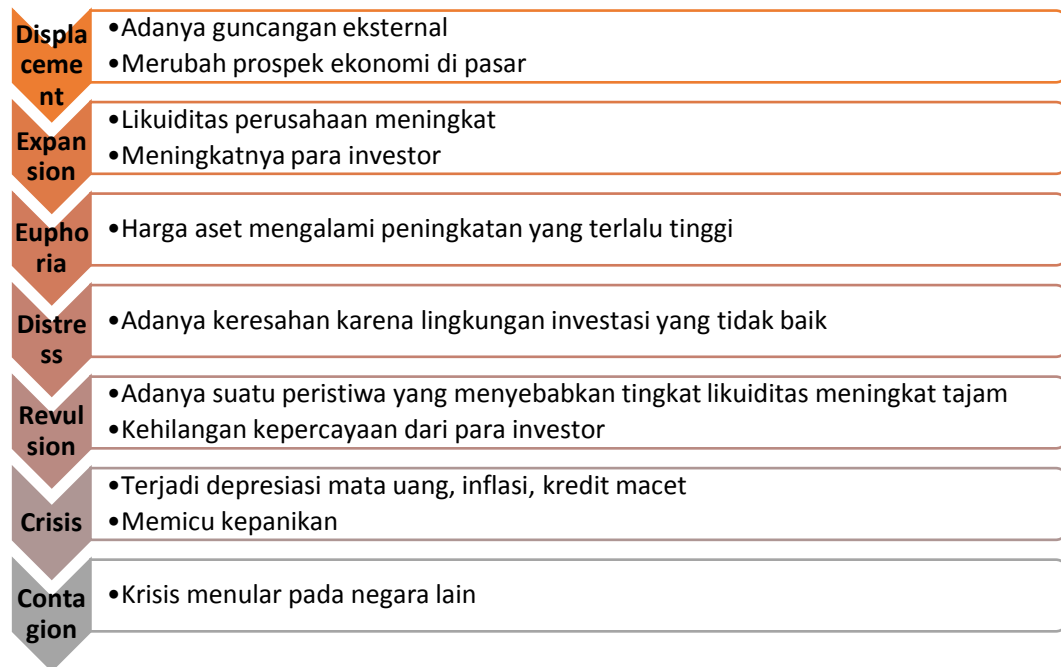
Salah satu faktor terjadinya krisis adalah karena tingginya kepercayaan diri masyarakat. Minsky berpendapat ketika ekonomi stabil dan ekspansif akan memicu kepercayaan diri perusahaan ataupun masyarakat untuk lebih berani mengambil resiko yang lebih tinggi yaitu mengambil utang/kredit secara berlebihan.⁴⁰ Hal inilah yang menjadi dasar utama teori *financial instability* milik Minsky. Minsky mengategorikan ada 3 fase unit ekonomi dalam membayar hutangnya, yaitu *hedge*, *speculative*, dan *ponzi*.⁴¹ *Hedge* merupakan fase dimana perusahaan dapat membayar semua hutangnya, termasuk hutang pokok dan bunga hutang. *Speculative* merupakan fase dimana perusahaan hanya mampu membayar bunga hutang dan tidak mampu membayar hutang pokok. Sedangkan *ponzi* merupakan fase dimana perusahaan tidak mampu membayar bunga hutang dan hutang pokoknya. Minsky menyatakan bahwa jika perekonomian didominasi oleh unit ekonomi yang bersifat *speculative* dan *ponzi*, maka akan mendorong terjadinya kredit macet dan menjadi landasan dari krisis ekonomi.

Menurut Minsky, ada tujuh tahapan terjadinya krisis finansial, yaitu: *displacement*, *expansion*, *euphoria*, *distress*, *revulsion*, *crisis*, dan *contagion*.

⁴⁰ Niall Kishtainy, *The Economics Book* (London: Dorling, 2012) p: 300.

⁴¹ Martin H Wolfson, "Minsky Theory of Financial Crisis in a Global Context," *Journal of Economic Issues* Vol XXXVI No 2 (Juni 2002): 394, <https://www.jstor.org/stable/4227789> (diakses pada 6 Oktober 2018).

Gambar 1.1: Tujuh Tahapan Krisis Minsky



Sumber: Buku *Introduction to International Political Economy 2nd Edition* (diolah oleh penulis)⁴²

Pada fase *displacement*, terjadi guncangan eksternal yang mengubah prospek ekonomi di pasar, sehingga terjadi perubahan ekspektasi terhadap profit di masa depan, seperti adanya perang, penemuan teknologi baru, dan lain sebagainya.⁴³ Pada fase ini, belum menyebabkan panik, krisis, maupun ketidakstabilan ekonomi. Sedangkan pada masa *expansion*, adanya guncangan eksternal tersebut diperkuat dengan meningkatnya likuiditas dari perusahaan. Akibatnya, iklim investasi menjadi sangat baik sehingga mendorong investor untuk melakukan penanaman modal. Pada fase ini juga para investor melakukan perluasan dari modal yang dimilikinya. *Expansion* ini dapat menjadi *euphoria* ketika harga-harga aset mengalami peningkatan terlalu tinggi. Hal ini

⁴² David N Balaam dan Michael Veseth, *Introduction to International Political Economy 2nd Edition*, (New Jersey: Prentice Hall, 2001) p: 175.

⁴³ *Ibid.*

menyebabkan investor melakukan jual-beli modal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari harga yang meningkat terus menerus.

Pada fase selanjutnya, *distress* merupakan fase antara *euphoria* dengan *revulsion* dimana pada fase ini memicu keresahan karena lingkungan investasi yang tidak stabil. Pada fase ini, kondisi pasar mulai lesu ditandai dengan aktivitas pasar yang menurun dan menurunnya likuiditas. Selanjutnya yaitu fase *revulsion* dimana adanya perubahan aksi dan ekspektasi yang diakibatkan adanya informasi baru atau peristiwa yang signifikan.⁴⁴ Pada fase ini, tingkat likuiditas meningkat tajam sehingga terjadi kehilangan kepercayaan investor terhadap pasar negara tersebut. Hal inilah yang memicu terjadinya fase krisis, seperti *panic rush*, *capital outflow*, depresiasi mata uang, inflasi, kredit macet dan lain sebagainya yang memicu kepanikan. Ketika sudah terjadi krisis ekonomi di satu negara, maka besar kemungkinan krisis tersebut akan menular ke negara lain. Fase inilah yang disebut fase penularan.

Pada penelitian ini juga akan menggunakan teori Ekonomi Politik Keynesian. Menurut Keynes, negara harus menggunakan kekuasaannya untuk mengurus dan memperkuat sistem pasar, namun tidak bersifat agresif seperti merkantilisme, melainkan peran negara dalam mengatur sistem pasar ketika terjadi keputusan irasional yang dihasilkan oleh perusahaan.⁴⁵ Hal ini disebabkan karena kapitalisme mengedepankan konsep "*love of money*".⁴⁶ Peran pemerintah dibutuhkan untuk mengatasi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh *invisible*

⁴⁴ *Ibid.*, p: 176

⁴⁵ *Ibid.*, p: 56.

⁴⁶ David N Balaam dan Michael Veseth, *Readings in International Political Economy* (New Jersey: Prentice Hall, 1996) p: 47.

hand.⁴⁷ Artinya, pada saat terjadinya krisis ekonomi, pemerintah harus ikut turut campur tangan dalam mengendalikan perekonomian nasional. Di sisi lain, Keynes menyatakan bahwa setiap konsumsi yang dilakukan oleh satu orang akan menjadi pendapatan bagi orang lain dalam perekonomian negara yang sama. Artinya, apabila seseorang melakukan konsumsi atau membelanjakan uangnya, maka menjadi pendapatan bagi orang lain sehingga siklus arus uang atau perekonomian dalam suatu negara dapat berjalan.⁴⁸ Sebaliknya, apabila masyarakat berhenti melakukan konsumsi, maka siklus arus uang tidak berjalan dan perekonomian menjadi lumpuh. Sehingga, Keynes berpendapat bahwa ketika terjadi krisis ekonomi, pemerintah harus melakukan kebijakan yang mendorong penyerapan tenaga kerja sehingga masyarakat memiliki pendapatan dan dapat melakukan konsumsi sehingga siklus arus uang dapat berputar.

Di sisi lain, penelitian ini juga akan menggunakan konsep *developmentalism*. Konsep ini menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi dalam suatu negara adalah hasil ikut campur intervensi dari negara (pemerintah).⁴⁹ Konsep ini berdasarkan pemahaman bahwa beberapa aktivitas ekonomi akan menjadi lebih kondusif untuk berkembang apabila negara ikut campur tangan.⁵⁰ Namun konsep ini tidaklah sama dengan merkantilisme, melainkan *developmentalism* merupakan bentuk koordinasi yang lebih seimbang antara

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Sarwat Jahan, Ahmed Saber Mahmud, dan Chris Papageorgiou, "What is Keynesian Economics?," *International Monetary Fund*, 2014, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2014/09/basics.htm> (diakses pada 23 Februari 2018).

⁴⁹ Luiz Carlos, "The Two Forms of Capitalism: Developmentalism and Economic Liberalism," *Brazilian Journal of Political Economy* Vol. 37, no 4 (Desember 2017): 682, <http://www.scielo.br/pdf/rep/v37n4/1809-4538-rep-37-04-680.pdf> (diakses pada 7 Oktober 2018).

⁵⁰ Erik S Reinert, "Developmentalism," *Working Papers in Technology Governance and Economic Dynamics* no. 34, <http://hum.ttu.ee/wp/paper34.pdf> (diakses pada 7 Oktober 2018).

pemerintah dan pasar sehingga menghasilkan pertumbuhan finansial yang lebih stabil dan efisien.⁵¹ Sehingga menurut konsep ini, pembangunan ekonomi merupakan hasil dari desain politik, dimana pasar memiliki peran yang utama, tetapi peran masyarakat juga menjadi variabel yang penting.⁵² Sehingga dapat dikatakan juga bahwa *developmentalism* merupakan neoliberalisme yang digunakan sebagai alat untuk mengembangkan tujuan-tujuan pembangunan pemerintah.⁵³

Di sisi lain, konsep *developmentalism* juga menyatakan bahwa peran pemerintah sebagai koordinator untuk sektor ekonomi yang non-kompetitif, sedangkan pasar sebagai koordinator untuk sektor ekonomi yang kompetitif.⁵⁴ Peran pemerintah dalam konsep *developmentalism* bukanlah sebagai peran langsung atau inisiator terhadap mekanisme pasar, melainkan menjalankan peran sebagai mediator dan penyusun rancangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa konsep ini mempunyai tujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam masyarakat akibat mekanisme pasar bebas.

Seperti yang diketahui, sistem neoliberalisme memiliki dampak negatif seperti tingginya tingkat kompetisi antar perusahaan, memicu semakin lebarnya ketidaksetaraan dalam masyarakat dan eksploitasi buruh.⁵⁵ Hal inilah yang membuat kondisi ekonomi Korea Selatan sangat buruk pada tahun 1997, ditambah lagi adanya krisis dari Thailand. Akibatnya, setelah terjadinya Krisis Finansial

⁵¹ Luiz Carlos, "The Two Forms of Capitalism," 684.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Inhye Heo, "Neoliberal Developmentalism in South Korea: Evidence from The Green Growth Policy Making Process," *Asia Pacific Viewpoint*, Vol. 56, No. 3 (Desember 2015): 351, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/apv.12093> (diakses pada 7 Oktober 2018).

⁵⁴ Carlos, "The Two Forms of Capitalism," 686.

⁵⁵ Inhye Heo, "Neoliberal Developmentalism in South Korea," 353.

Asia 1997, masyarakat Korea Selatan menuntut pemerintah untuk lebih aktif dalam mengatur perekonomian negara agar dampak negatif tersebut tidak terjadi lagi.⁵⁶ Masyarakat Korea Selatan pun menuntut untuk diterapkan kebijakan pembangunan yang berlanjut dimana bukan hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi saja tapi juga pembangunan masyarakat.

Penelitian ini akan berfokus pada perbandingan kebijakan industri. Perbandingan kebijakan sendiri merupakan disiplin ilmu yang mencari perbedaan dan persamaan dari suatu kasus kebijakan serta melihat dan menganalisa dampak-dampak yang ditimbulkan dari perbedaan ataupun persamaan kebijakan tersebut.⁵⁷ Adapun definisi kebijakan industri merupakan kebijakan yang berfokus kepada investasi, produktivitas, dan pertumbuhan dalam sektor perdagangan barang dan jasa.⁵⁸ Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencapai dasar yang berkelanjutan dengan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan sehingga tercipta pembangunan ekonomi. Dalam kebijakan ini, pemerintah mempunyai peran penting untuk meningkatkan daya saing ataupun kemampuan dari industri domestiknya. Selain itu, tujuan strategis dari kebijakan industri dalam sebuah negara adalah untuk mendorong jumlah ekspor serta mengurangi jumlah impor, dengan berfokus pada kompetisi internasional sebagai elemen kunci dari kebijakan ini.⁵⁹

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ “Comparative Public Policy,” *Oxford Research Encyclopedias*,” <http://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-134> (diakses pada 16 Januari 2019)

⁵⁸ “National Industrial Policy- A Strategic Plan for Growth and Development,” *Jamaica Information Service*, 25 April 1996, <http://web.stanford.edu/~dharris/papers/National%20Industrial%20Policy,%20A%20Strategic%20Plan%20for%20Growth%20and%20Development.pdf> (diakses pada 4 November 2018).

⁵⁹ *Ibid.*

1.8. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.8.1. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Korea Selatan untuk menanggulangi krisis ekonomi. Hal ini selaras dengan pernyataan Martyn Descombe yang menyatakan jenis penelitian deskripsi merupakan jenis penelitian yang mendeskripsikan fenomena dan menjelaskan keterkaitan antar fenomena tersebut.⁶⁰

Di sisi lain, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami fenomena permasalahan sosial atau hubungan antar manusia.⁶¹ Sehingga, pendekatan kualitatif dapat didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data dan strategi untuk menganalisis data menjadi bentuk bahasa lisan dan bukan dalam bentuk angka-angka yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang fenomena, aktivitas-aktivitas, proses-proses sosial dan berfokus pada makna (*meanings*).⁶²

1.8.2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell, dalam penelitian kualitatif, ada empat cara dalam mengumpulkan data yaitu melalui interview, observasi, dokumen atau studi

⁶⁰ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 100.

⁶¹ John W Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions* (USA: Sage Publications, 1998), 15.

⁶² *Ibid.*

literatur, dan materi audio-visual.⁶³ Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik studi literatur. Teknik ini sendiri meliputi penelitian berbasis internet dan penelitian berbasis dokumen atau arsip.⁶⁴ Oleh sebab itu, peneliti menggunakan data sekunder yang didapat dari buku, jurnal, dokumen resmi kebijakan pemerintah Korea Selatan, laporan IMF, ADB, *World Bank*, ILO, dan berita seperti CNN, BBC, dan juga *New York Times*.

1.9. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Masing-masing bab akan menjelaskan hal yang berbeda yang berkorelasi satu sama lainnya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bab satu akan menjelaskan tentang topik dan judul penelitian. Dalam bab ini, penulis juga menjabarkan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah untuk memberikan gambaran umum tentang topik penelitian.

Dalam bab dua, penulis akan menjelaskan asal mula krisis ekonomi. Penulis akan menjelaskan masing-masing penyebab krisis ekonomi Asia tahun 1997 maupun krisis ekonomi AS 2008 dan bagaimana krisis tersebut dapat mempengaruhi ekonomi dunia. Sedangkan dalam bab tiga, penulis akan menjelaskan dan membandingkan kondisi industri Korea Selatan saat krisis 1997 dan 2008. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa krisis ekonomi 1997 dan 2008 sangat berdampak buruk bagi perekonomian Korea Selatan terutama dalam bidang industri.

⁶³ *Ibid.*, p: 19.

⁶⁴ *Ibid.*, p: 71.

Pada bab empat, penulis akan menganalisa dan membuat perbandingan kebijakan industri yang dilakukan oleh Presiden Kim Dae Jung dan Lee Myung Bak. Hal ini dilakukan untuk melihat perbedaan kebijakan yang seperti apa sehingga pada tahun 2008, Korea Selatan lebih cepat bangkit dari krisis ekonomi dibandingkan pada saat krisis 1997. Pada bab terakhir yaitu bab lima, penulis akan menyimpulkan perbedaan kebijakan bidang industri yang seperti apa sehingga Korea Selatan dapat mengalami pemulihan ekonomi pada krisis 2008 lebih cepat dibanding 1997.